

**PERPANJANGAN MASA PENAHANAN  
DITINJAU DARI SEGI HAK ASASI MANUSIA  
DI PENGADILAN NEGERI BOYOLALI  
(STUDI PERKARA NOMOR:242/Pid.B/2007/PN.Bi DAN  
PERKARA NOMOR:1/PID.B/S/2010/PN.Bi)**



**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna  
Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh  
Gina Dwi Korina  
E0006275**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**  
*commit to user*  
**2010**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Penulisan Hukum ( Skripsi )  
PERPANJANGAN MASA PENAHANAN  
DITINJAU DARI SEGI HAK ASASI MANUSIA  
DI PENGADILAN NEGERI BOYOLALI  
(STUDI PERKARA NOMOR:242/Pid.B/2007/PN.Bi DAN  
PERKARA NOMOR:1/PID.B/S/2010/PN.Bi)**

**Oleh**

**Gina Dwi Korina**

**E0006275**

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Surakarta, 20 Oktober 2010**

**Dosen Pembimbing**

**Pembimbing**

**Bambang Santoso, S.H., M.Hum.  
NIP. 1962 020910803 1001**

# **PENGESAHAN PENGUJI**

**Penulisan Hukum ( Skripsi )**

**PERPANJANGAN MASA PENAHANAN DITINJAU DARI SEGI HAK  
ASASI MANUSIA DI PENGADILAN NEGERI BOYOLALI (STUDI  
PERKARA NOMOR:242/Pid.B/2007/PN.Bi DAN  
PERKARA NOMOR:1/PID.B/S/2010/PN.Bi)**

**Oleh  
Gina Dwi Korina**

**E0006275**

**Telah diterima dan dipertahankan di hadapan  
Dewan Penguji Penulisan Hukum ( Skripsi )  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Pada :**

**Hari : Selasa**

**Tanggal : 9 Nopember 2010**

**DEWAN PENGUJI**

1. **Kristiyadi, S.H, M.Hum** ( ..... )  
**NIP.1958122519866011001**
2. **Edy Herdyanto, S.H., M.H.,** ( ..... )  
**NIP. 195706101986011001**
3. **Bambang Santoso, S.H., M.Hum.** ( ..... )  
**NIP. 1962 020910803 1001**

**MENGETAHUI  
Dekan,**

**Mohammad Jamin, S.H, M.Hum**  
**NIP. 1961 0930 198601 1 001**

**PERNYATAAN**

Nama : Gina dwi Korina

NIM : E0006275

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: **PERPANJANGAN MASA PENAHANAN DITINJAU DARI SEGI HAK ASASI MANUSIA DI PENGADILAN NEGERI BOYOLALI (STUDI PERKARA NOMOR: 242/Pid.B/2007/PN.Bi DAN PERKARA NOMOR: 1/PID.B/S/2010/PN.Bi)** betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 20 Oktober 2010

Yang membuat pernyataan

**Gina Dwi Korina**

**E0006275**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

“Setiap langkah besar selalu diawali dengan satu langkah kecil”

(Penulis)

”Kebahagiaan dapat kita temukan meski dalam kegelapan sekalipun, jika kita tidak pernah lupa untuk selalu menyalakan cahaya”

(Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore-Harry Potter and The Goblet of Fire)

### PERSEMBAHAN

Tulisan ini kupersembahkan untuk :

1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Ayahku Drs. Sugiyanto, M.Si. dan Ibuku Sri Naryani
3. Kakakku Dony Mahendra, Sstp
4. Teman Dalam Suka Duka Deny Rachmanto
5. Sahabat-sahabatku

## ABSTRACT

**GINA DWI KORINA, E 0006275, THE RENEWAL OF DETENTION PERIOD REVIEWED FROM HUMAN RIGHTS ASPECT IN BOYOLALI COURT (A STUDY ON THE VERDICT NUMBER: 242/PID.B/2007/PN.BI AND VERDICT NUMBER 1/PID.B/S/2010/PN.BI),** Law Faculty of Sebelas Maret University.

This law research aims to know about form the renewal executing of detention period which reviewed from human rights aspect.

This law research use the research methods such as, a type of empiric research, the descriptive research, study case approach, qualitative methods, technique of data analysis use qualitative methods, collecting of law objects use collecting technique of primer data by interview, also it use secondary data which it got by bibliography. Resource of the law research is primary of law objects which it got from some information or facts by interview in field, and secondary data resource is documents, archives, legislation rule and other research object.

According to result of the research, it will get conclusion that renewal executing of detention period in Boyolali Court appropriate decision in KUHAP procedure, but if it aim to verdict number : 242/PID.B/2007/PN.BI and 1/PID.B/S/2010/PN.BI felt not accurate. The background of judge need time is caused there is some inspection necessity which is still not completed.

Keyword: executing, renewal of detention period, human rights.

## ABSTRAK

**GINA DWI KORINA, E 0006275, PERPANJANGAN MASA PENAHANAN DITINJAU DARI SEGI HAK ASASI MANUSIA DI PENGADILAN NEGERI BOYOLALI (STUDI PERKARA NOMOR: 242/Pid.B/2007/PN.Bi DAN PERKARA NOMOR: 1/PID.B/S/2010/PN.Bi), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.**

Penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan perpanjangan masa penahanan ditinjau dari segi hak asasi manusia.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : jenis penelitian empiris, sifat penelitian deskriptif, pendekatan studi perkara, metode penelitian kualitatif, sumber penelitian hukum dari bahan hukum primer yakni dari data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui metode wawancara, serta bahan hukum sekunder yang berupa perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim serta publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan, perwujudan pelaksanaan perpanjangan masa penahanan di Pengadilan Negeri Boyolali telah sesuai dengan penetapan dalam hal serta dengan tata cara yang diatur dalam KUHAP, tetapi jika mengacu pada Perkara Nomor: 242/Pid.B/2007/PN.Bi dan Perkara Nomor: 1/PID.B/S/2010/PN.Bi dirasa tidak tepat. Hal yang melatar belakangi hakim membutuhkan waktu adalah dikarenakan memang ada beberapa kepentingan pemeriksaan yang memang masih belum terpenuhi.

Kata kunci : penahanan, perpanjangan masa penahanan, HAM



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul **“PERPANJANGAN MASA PENAHANAN DITINJAU DARI SEGI HAK ASASI MANUSIA DI PENGADILAN NEGERI BOYOLALI (STUDI PERKARA NOMOR: 242/Pid.B/2007/PN.Bi DAN PERKARA NOMOR: 1/PID.B/S/2010/PN.Bi)”**

Skripsi ini dapat terselesaikan karena adanya bantuan, bimbingan dan dorongan, saran, nasehat, fasilitas, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Bapak Bamabang Santoso, S.H., M.Hum selaku pembimbing penulisan hukum yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya penulisan hukum ini.
3. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H., selaku ketua bagian Hukum Acara Pidana.
4. Bapak Kristiyadi, S.H., M.Hum dan Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H., selaku dosen penguji.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan hukum ini.
6. Bapak dan Ibu staf karyawan kampus Fakultas Hukum UNS yang telah membantu dan berperan dalam kelancaran kegiatan proses belajar mengajar dan segala kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum UNS.
7. Ayahku Drs. Sugiyanto, M.si dan Ibuku Sri Naryani, yang selalu memotivasi dan mendoakanku, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

*commit to user*



8. Kakakku Dony Mahendra, Sstp yang selalu mendoakanku.
9. Teman terbaik dalam suka dan duka Deny Rachmanto yang selalu memberi dukungan dan bantuan dalam segala hal.
10. Sahabat terbaik Kos Bougainville 2, Anggarda Kristianti Utomo, Rintha Putrinta, Prihrisky Stantia, Feli Firdianawati, Fela Firdianawati, Angi Prameswari, Yenni Tirtaningrum dan Esti Koco.
11. Teman-teman Magang di Pengadilan Negeri Boyolali, Danang, Wawan, Bimo Adi, Lesitari Budi Utami, Dhani, Noni Kusuma Dewi, Lukmanu Kurnia dan Yulis Woro.
12. Teman-teman senasib seperjuangan dalam mengerjakan penulisan hukum dengan segala informasi dan kesetiannya dalam mendukung dan membantu.
13. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu.

Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada Penulis selama ini.

Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan Hukum ini banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Untuk itu Penulis mengharapkan segala kritik dan saran membangun sebagai perbaikan serta kesempurnaan Penulisan Hukum ini. Akhirnya Penulis berharap agar Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

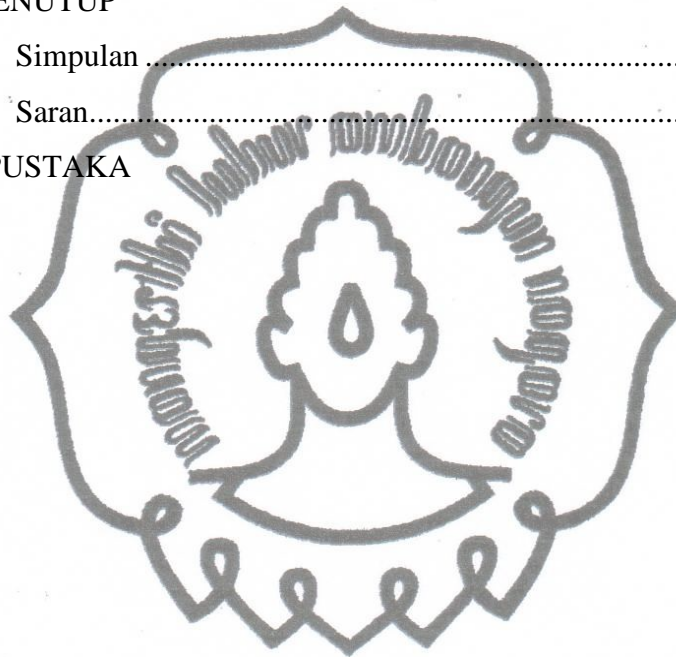
Surakarta, 20 Oktober 2010

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teori.....	23
1. Tinjauan Tentang Penahanan .....	23
2. Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia.....	31
B. Kerangka Berpikir.....	34
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Implementasi hak Asasi Manusia di dalam Kasus Perpanjangan Masa Penahanan Pada Perkara nomor: 242/Pid.B/2007/PN.Bi dan perkara Nomor: 1/PID.B/S/2010/PN.Bi. ....	37
1. Gambaran Umum Perkara Nomor: 242/Pid.B/2007/PN.Bi..	37
2. Gambaran Umum Perkara Nomor: 1/PID.B/S/2010/PN.Bi	43
3. Pelaksanaan Perpanjangan masa penahanan Pada Perkara	

Nomor:242/Pid.B/2007/PN.Bi dan perkara Nomor: 1/PID	
.B/S/2010/PN.Bi .....	48
B. Hal yang melatar Belakangi Hakim membutuhkan Waktu	
Dalam Memutus Perkara Nomor:242/Pid.B/2007/PN.Bi dan	
perkara Nomor:1/PID.B/S/2010/PN.Bi .....	55
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan .....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	



**DAFTAR GAMBAR DAN TABEL**

Gambar 1. Interaktif Model of Analysis.....	18
Tabel 1. Jangka Waktu Penahanan dan Penahanan Lanjutan .....	30
Tabel 2. Pengecualian dalam Perpanjangan penahanan.....	31
Gambar 1. Skematik Kerangka Berpikir.....	34



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang sedang berkembang yang saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang, termasuk diantaranya adalah pembangunan di bidang hukum. Hukum mempunyai tempat yang sangat penting dan tidak bisa terlepas dari realita atau kenyataan yang ada dalam masyarakat, yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan beraneka ragam adat istiadatnya diseluruh nusantara. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perjalanan pembaharuan hukum di Indonesia, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kelancaran pembangunan nasional.

Pembangunan hukum tidak terlepas dari pertimbangan struktur masyarakat, ekonomi, sosial, dan budaya karena sasaran utama pembangunan bangsa Indonesia adalah terciptanya kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang maju dalam suasana tentram sejahtera lahir maupun bathin. Perkembangan dari pembangunan hukum itu tidak terlepas kaitannya dengan dimensi kultural nilai-nilai kemanusiaan yang beranjak dari nilai keadilan yang bersumber pada Hak Asasi Manusia. Dimensi ini sangat penting dalam kaitan dengan upaya untuk menegakkan hukum dalam kerangka mencapai tujuan yaitu keadilan dan kepastian hukum.

Hukum adalah sektor strategis yang merupakan sarana perekayasa sosial dalam arti sebagai sarana untuk mengendalikan arah perubahan agar tetap pada bingkai negara persatuan dan kesatuan Indonesia. Konteksualitas hal ini diwujudkan dengan dibuatnya berbagai peraturan perundangan yang bermaksud mengatur tata kehidupan masyarakat. Pada dimensi lain, hukum merupakan batas-batas kebebasan antara individu dengan patokan perilaku di dalam interaksi kemasyarakatan hingga hukum dapat memberikan rasa

aman, mengayomi dan menciptakan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada penampilan yang lebih konkret, hukum sering dilihat sebagai suatu medium untuk membendung tindak kekerasan, mengeleminir friksi dan menyelesaikan konflik yang terjadi akibat terjadinya pergesekan kepentingan antar warga. Juga hukum menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul antar lembaga masyarakat termasuk kepentingan pemerintah yang bertindak untuk dan atas nama negara. Dalam hal apabila ada warga masyarakat yang melakukan tindakan dan berpotensi penggunaan kekerasan mengancam, hukum sebagai penengah perselisihan itu adalah hukum dengan menetapkan kekuatan berupa sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi yang diterima oleh pihak yang dinilai melanggar hukum diharapkan akan mengembalikan ketentraman di dalam masyarakat sehingga bagi yang merasa dirugikan secara langsung oleh tindakan tersebut mengurungkan niatnya untuk balas dendam.

Hukum sendiri juga bisa menjadi penyebab kekerasan jika dipraktekkan secara tidak adil. Di dalam hal terjadinya tindak pidana, ada kepentingan yang diintervensi oleh subyek hukum tertentu yang menyebabkan munculnya kerugian. Untuk itu, negara melalui kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengambil tindakan tertentu kepada pihak yang menimbulkan kerugian. Kewajiban ini sesuai dengan fungsi negara sebagai organisasi publik yang harus melindungi warganya dari tindakan sewenang-wenang dari pihak manapun, termasuk tindak sewenang-wenang dari rakyatnya sendiri.

Tindakan oleh negara itu di dalam hukum pidana bermaksud memulihkan kerugian yang timbul dan menciptakan ketentraman di dalam masyarakat. Tindakan konkret di dalam hukum pidana melakukan intervensi terhadap rasa tenteram dan damai di dalam masyarakat sehingga ketenteraman dan kedamaian tidak terganggu. Penahanan, sebagaimana



dinyatakan dalam KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur di dalam KUHAP.

Cara-cara sebagaimana dimaksudkan itu secara teknis meliputi masa atau waktu penahanan, dalam hal apa dan bagaimana penahanan boleh dilakukan dan bagaimana perlakuan seorang yang ditahan. Kesemuanya harus dipenuhi oleh aparat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan sebagaimana dimaksud di dalam KUHAP itu.

Penahanan yang dilakukan oleh aparat yang berwenang, meskipun telah dibatasi sedemikian rupa oleh ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan tetapi hakekatnya tetap membatasi kebebasan seseorang. Pembatasan ini pada dasarnya adalah sebagai balasan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau seperti harga yang harus dibayar sebagai akibat tindakannya yaitu menciptakan ketidaktertaman dan bahkan sebuah kekacauan yang pada akhirnya membuat kemunduran di dalam kualitas kehidupan bermasyarakat.

Cara penahanan seperti dimaksudkan itu adalah sebagai standar yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan HAM yang harus tetap dijunjung tinggi sebagai refleksi dari hak dasar manusia untuk tetap dilindungi oleh hukum. Kendatipun seseorang telah melakukan kesalahan, namun hak-haknya sebagai manusia harus tetap dihormati. Akan tetapi di dalam konseptualisasinya akan selalu memunculkan benturan antara penahanan yang pada dasarnya adalah pembatasan terhadap kebebasan seseorang pada satu sisi dengan nilai keadilan pada disisi yang lain. Nilai keadilan yang sifatnya abstraktif dan filosofis harus tetap dapat dipenuhi di dalam tiap keputusan yang dijatuhkan dan akan membebani warga masyarakat.

Hal itu berarti bahwa diperlukan sebuah pengkajian tentang batas-batas bagaimanakah seharusnya sebuah penahanan dapat dilakukan sehingga tetap dapat dinyatakan bahwa penahanan yang membatasi kebebasan itu tetap di dalam nilai-nilai keadilan. Kendatipun sifatnya abstrak, namun dapat ditelaah berdasarkan prinsip-prinsip normatif atau dalam bingkai hukum.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya, sehingga aturan-aturan yang ada itu tidak hanya diperuntukan bagi orang-perorang atau kelompok tertentu saja tetapi bersifat umum demi kepentingan individu dan atau masyarakat. Hukum adalah harta pusaka dari seluruh kemanusiaan. Namun demikian, hukum tanpa prinsip-prinsip kemanusiaan, pada hakekatnya adalah bukan hukum karena akan merupakan penindasan dan tirani.

Adanya jaminan terhadap HAM, dapat dimaknai bahwa dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara), begitu juga Undang-Undang Dasar 1945, melalui beberapa pasal-pasal yang mengatur mengenai HAM, misalnya pada pasal 27 ayat (1) tentang Asas Persamaan Kedudukan di muka Hukum, ayat ini diimplikasikan dalam prose peradilan pidana sebagai Asas Praduga Tidak Bersalah, sebagaimana mestinya disebutkan di dalam Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan / atau dihadapan di depan pengadilan yang menyatakan kesalahan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pembuat Undang-Undang telah sengaja menciptakan cakrawala hukum acara pidana yang penuh dengan hak asasi sebagai penuntun sekaligus menjadi perisai diri mereka berhadapan dengan wewenang yang diberikan undang-undang kepada aparat penegak hukum. Dalam kenyataan dan praktek penegakan hukum. Asas-asas hukum tidak mampu bertahan dan tidak berdaya ketika berhadapan dengan arogansi kekuasaan yang diperankan aparat penegak hukum yang selalu berperilaku mempertontonkan kesewenangan-wewenang kekuasaan. Hukum itu menghendaki keadilan untuk menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam masyarakat.

Hukum adalah hanya apa yang berarti untuk menjadikan keadilan, sebab hukum yang tidak adil menentang eksistensi sendiri. Di dalam keadilan, tersimpul hubungan kemanusiaan selengkapanya sehingga ada kewajiban memenuhi, baik kepentingan diri sendiri, kepentingan sosial yang kebutuhan dan yang kejiwaan maupun kepentingan religius. Adapun, di dalam kepentingan, sosial itu, tercakup kepentingan negara sebagai negara, kepentingan umum para warga negara bersama, dan kepentingan khusus dari para warga negara perseorangan, keluarga, suku bangsa, dan setiap golongan warga negara.

KUHAP telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang "berderajat", sebagai makhluk tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan KUHAP dalam posisi harkat dan martabatnya sebagai manusia, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Hukum mesti ditegakan. Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa, "tidak boleh ditelanjangi" hak asasi utama yang melekat pada dirinya. KUHAP yang merupakan aturan dalam proses peradilan pidana atau proses penegakan hukum pidana, ternyata masih banyak terjadi kekurangan.

Undang-Undang tersebut dirasakan belum dapat mengakomodasi harapan para pencari keadilan, terutama mengenai penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah yang merupakan asas hukum yang penting dalam proses peradilan pidana. Dalam hal ini asas yang paling pokok dari prosedur peradilan pidana modern yaitu asas praduga tidak bersalah. Pengaturan tentang asas ini telah ditetapkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tanggal 10 Desember 1948 dan juga dalam Konvensi Internasional, perjanjian Internasional tentang hak sipil dan hak politik (New York 1966).

Dalam hubungan ini, unsur mutlak dalam hukum adalah asas dan kaidah, kekuatan jiwa hukum terletak pada dua unsur tersebut, bahwa unsur asas hukum merupakan jantung pertahanan hidup hukum dalam masyarakat. Semakin dipertahankan asas hukum, semakin kuat dan bermakna kehidupan dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Sebaliknya, semakin diingkari penegakan asas hukum pidana terhadap perbuatan yang merugikan atau membahayakan anggota masyarakat, dan semakin ditinggalkan atau diabaikan asas hukum pidana dalam praktek, hukum pidana seakan hidup tak mau, matipun enggan.

Sehubungan dengan hal diatas, memberikan kewenang-wenangan hukum kepada negara melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan. Hal ini merupakan sumber kewenangan dan kekuasaan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses ini (polisi, jaksa, hakim). Kewenangan tersebut antara lain adalah tindakan Upaya Paksa dari para penegak hukum, yang sering melanggar HAM tersangka/terdakwa dilakukan melalui tindakan kekerasan dan penyiksaan. Upaya paksa oleh penegak hukum terhadap tersangka harus dilakukan menurut cara yang ditentukan undang-undang (pasal 21 ayat (1) KUHAP), sehingga apabila melanggar tersangka berhak mengajukan keberatan melalui Praperadilan. Berbagai bentuk tindakan dan wewenang yang diberikan undang-undang kepada polisi, jaksa dan hakim dalam rangka pembatasan kebebasan dan hak asasi seseorang. Mulai dari bentuk penangkapan, penahanan (tempat penahanan),

penyitaan dan pengeledahan. Berkaitan hak diatas penulis berupaya menguak perihal upaya paksa yang disebut dengan penahanan, bagaimana penahanan yang benar dan bagaimana yang telah dilakukan.

Berkaitan dengan penahanan, Asas Praduga Tidak Bersalah telah dimuat dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Selanjutnya berdasarkan UU RI No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa: Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari kedua pasal diatas jelas bahwa penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah, adanya limitatif penahanan dan adanya persamaan dimuka hukum seharusnya berlaku tanpa diskriminasi (dengan adanya kata setiap orang dan seterusnya) sesuai pasal 27 ayat (1) UUD 1945, penghayatan, pengamalan, dan pelaksanaan Hak Asasi Manusia maupun Hak serta Kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan menjadi suatu keharusan yang mendasari setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik dipusat maupun didaerah. Rumah Tahanan Negara adalah tempat tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung sesuai pasal 19 ayat (1) Peraturan pemerintah No. 27 Tahun 1983 yang mengacu pada landasan Pancasila (landasan filosofi), Landasan Operasional dan Landasan Konstitusional serta prinsip-prinsip dalam KUHAP yang tidak boleh disimpangi.



Bagaimanapun juga, keadilan itulah yang dicari orang dengan tiada henti, diperjuangkan oleh orang dengan gigih, dinantikan oleh orang dengan penuh kepercayaan dari pihak kaum penguasa dan sesamanya serta orang akan menentang sekeras-kerasnya apabila keadilan tidak ada. Di dalam hubungan keadilan itu, tersimpul hubungan kemanusiaan selengkapnya sehingga ada kewajiban memenuhi, baik kepentingan diri sendiri, kepentingan sosial yang kebutuhan dan yang kejiwaan maupun kepentingan religius. Adapun, di dalam kepentingan sosial itu, tercakup kepentingan negara sebagai negara, kepentingan umum para warga negara bersama, dan kepentingan khusus dari para warga negara perseorangan, keluarga, suku bangsa, dan setiap golongan warga negara.

Kendati pada awalnya konsep keadilan itu di maksudkan dalam bidang ekonomi, tetapi prinsip kejujuran dan dua syarat tersebut dapat diterapkan dalam hukum. Prinsip inilah yang juga harus dipatuhi dalam pelaksanaan hukum guna mencapai keadilan. Meskipun sesuatu itu "adil" sangat relatif tentunya, keadilan tergantung dari pertimbangan subjektif, waktu, dan tempat. Apa yang oleh satu orang dinyatakan tidak adil, dan pula apa yang sekarang dinyatakan tidak adil, mungkin pada lain waktu tidak demikian, atau apa yang di tempat ini dinyatakan adil mungkin ditempat lain dinyatakan tidak adil.

KUHAP telah menggariskan aturan yang melekatkan integritas harkat harga diri kepada tersangka atau terdakwa, dengan jalan memberi perisai hak-hak yang sah kepada mereka. Pengakuan hukum yang tegas akan hak asasi yang melekat pada diri mereka, merupakan jaminan yang menghindari mereka dari tindakan sewenang-wenang, misalnya telah memberi hak kepada tersangka atau terdakwa untuk "segera mendapat pemeriksaan" pada tingkat penyidikan maupun hak untuk segera mendapat pemeriksaan dalam sidang pengadilan guna memperoleh putusan yang seadil-adilnya. Juga memberi hak untuk memperoleh bantuan hukum pada setiap tingkat



pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan.

Demikian juga mengenai "pembatasan" jangka waktu penangkapan dan penahanan, ditentukan secara limitative bagi semua instansi dalam setiap tingkat pemeriksaan. Bahkan untuk setiap penangkapan atau penahanan, yang dikenakan, wajib diberitahukan kepada keluarga mereka. Dengan demikian tersangka atau terdakwa maupun keluarga mereka, telah diberikan kepastian dalam segala bentuk tindakan penegakan hukum. Ini sejalan dengan tujuan KUHAP sebagai sarana pembantuan hukum, yang bermaksud hendak melenyapkan kesengsaraan masa lalu, membuka tabir kecerahan langit bagi setiap orang yang berhadapan dengan aparat penegak hukum, memperdengarkan irama yang bertemakan : "mengangkat harkat dan derajat kemanusiaan" tersangka atau terdakwa. KUHAP telah mencoba menggariskan tata tertib hukum acara yang akan melepaskan tersangka atau terdakwa maupun keluarganya dari kesengsaraan putus asa di belantara penegakan hukum yang bertepe, karena sesuai dengan jiwa dan semangat yang diamanatkan, tersangka atau terdakwa harus diperlakukan berdasar nilai-nilai yang manusiawi.

Di dalam hal penahanan. Apabila pejabat penegak hukum melakukan tindakan penahanan kepada tersangka atau terdakwa, sejak semula orang yang ditahan dan keluarganya :

1. Wajib diberitahu alasan penahanan dan sangkaan atau dakwaan yang dipersalahkan kepadanya;
2. Keluarga yang ditahan harus segera diberitahu tentang penahanan serta ditempat mana dia ditahan;

Dengan tindakan penahanan itu tersangka atau terdakwa telah tahu dengan pasti berapa lama setiap penahanan yang dilakukan oleh setiap instansi dalam setiap tingkat pemeriksaan.

Wewenang diberikan kepada penyidik sedemikian luasnya, bersumber atas wewenang yang diberikan undang-undang sehingga berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang, tetapi wewenang tersebut harus dihubungkan dengan landasan prinsip hukum yang menjamin terpeliharanya harkat-martabat kemanusiaan seseorang serta tetap berpedoman pada landasan orientasi keseimbangan antara perlindungan kepoentingan tersangka pada satu pihak dan kepentingan masyarakat serta penegakan ketertiban hukum pada pihak lain. Pasal 1 butir 20 KUHAP menjelaskan ; "Penangkapan adalah suatu tindakan penyelidikan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang". Ini berarti bahwa penangkapan adalah "tindakan pengekangan sementara waktu" kebebasan tersangka/terdakwa, guna kepentingan penyidikan atau penuntutan.

Di dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang adalah seperti adanya klasifikasi jenis tahanan, KUHAP mengatur dalam pasal 22 ayat (1) yaitu jenis penahanan dapat berupa :

1. Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan);
2. Penahanan rumah, dan
3. Penahan kota.

Di samping hak masyarakat/korban yang dirugikan harus dilindungi, juga harkat dan martabat tersangka/tahanan harus dilindungi agar tidak terjadi kesewenangan dari pihak atau korban dalam keseimbangan dengan kepentingan umum.

Dengan latar belakang tersebut diatas, maka penulis mencoba untuk mengangkat persoalan mengenai:

*commit to user*

**“PERPANJANGAN MASA PENAHANAN DITINJAU DARI SEGI HAK ASASI MANUSIA DI PENGADILAN NEGERI BOYOLALI (STUDI PERKARA NOMOR: 242/Pid.B/2007/PN.Bi DAN PERKARA NOMOR: 1/PID.B/S/2010/PN.Bi)”**

**B. Perumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam suatu penelitian merupakan suatu pedoman untuk menganalisis persoalan yang diteliti, serta untuk mempermudah pembatasan permasalahan sehingga sasaran yang hendak dicapai lebih jelas dan terarah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi Hak Asasi Manusia didalam kasus perpanjangan masa penahanan pada perkara Nomor: 242/Pid.B/2007/PN.Bi dan perkara Nomor: 1/PID.B/S/2010/PN.Bi?
2. Apakah yang melatar belakangi hakim membutuhkan waktu dalam memutus Perkara Nomor: 242/Pid.B/2007/PN.Bi dan Perkara Nomor: 1/PID.B/S/2010/PN.Bi, sehingga memerlukan perpanjangan masa penahanan?

**C. Tujuan penelitian**

Suatu penelitian tentunya mempunyai tujuan yang jelas dan ringkas sehingga memberikan arah pada penelitiannya. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan prosedur perpanjangan masa penahanan di pengadilan Negeri Boyolali.
  - b. Untuk mengetahui hal-hal yang melatar belakangi keterlambatan hakim dalam memutus Perkara Nomor:

242/Pid.B/2007/PN.Bi dan Perkara Nomor: 1/PID.B/S/2010/PN.Bi, sehingga perlu melakukan penambahan masa penahanan.

2. Tujuan subyektif

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dibidang Hukum Pidana, khususnya dalam perpanjangan masa penahanan ditinjau dari segi HAM.
- b. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- c. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah peneliti peroleh agar dapat member manfaat bagi peneliti dan masyarakat pada umumnya.

**D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- b. Diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

- c. Memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti
2. Manfaat Praktis
    - a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti.
    - b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian dalam penelitian ini.

### **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten (Soerjono Soekanto, 1986 : 42). Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa (Soerjono Soekanto, 1986 : 43).

Metode adalah pedoman cara seorang ilmuan mempelajari dan memahami lingkungan yang dihadapi (Soerjono Soekanto, 1986 : 6). Maka dalam penulisan skripsi ini bisa disebut sebagai suatu penelitian ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya dengan menggunakan metode yang tepat.

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis dan pemilihan jenis penelitian tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yang empiris atau sosiologis. Penelitian empiris yang dimaksud adalah penelitian yang bersumber dari data yang



didapat dari lapangan serta sebagai penunjangnya adalah bahan-bahan dari kepustakaan.

## 2. Sifat penelitian

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori lama atau dalam kerangka menyusun teori baru (Soerjono Soekanto, 1986: 10).

Penelitian deskriptif keberadaannya dimaksudkan untuk memberikan data yang menggambarkan semua data yang diperoleh yang berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada. Sehingga dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara konkrit mengenai perpanjangan masa penahanan ditinjau dari segi Hak Asasi Manusia di Pengadilan Negeri Boyolali (Perkara Nomor: 242/Pid.B/2007/PN.Bi dan Perkara Nomor: 1/PID.B/S/2010/PN.Bi)

## 3. Pendekatan penelitian

Penelitian hukum ini termasuk penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif, yang mengolah data primer dan data sekunder bukan dalam bentuk perbandingan maupun perhitungan angka-angka sehingga didapat fakta-fakta yang disusun untuk menemukan masalah beserta penyelesaiannya, “Suatu penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dalam suatu fenomena social yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat, dan waktu” (Djam’an Satori, 2009:22).



#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat di mana penelitian dilaksanakan guna memperoleh keterangan-keterangan, informasi, dan data yang diperlukan dalam penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti. Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang mengkaji hukum dalam realitas atau kenyataan dalam masyarakat, maka penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Boyolali serta tempat-tempat lain yang terdapat data-data yang diperlukan, dalam rangka mengidentifikasi data-data secara sistematis.

#### 5. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Data adalah hasil dari penelitian baik yang berupa fakta-fakta atau angka-angka yang dapat dijadikan bahan sebagai suatu sumber informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Jenis data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

##### 1.1 Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau dari lapangan. Di mana data yang dikumpulkan berasal dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian di lapangan, yaitu melalui wawancara langsung dengan pihak yang berkompeten di Pengadilan Negeri Boyolali.

##### 1.2 Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang tidak diperoleh langsung dari sumbernya, tetapi diperoleh dari dokumen / berupa dokumen baik yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, yang berupa sejumlah pendapat, teori yang di dapat dari mempelajari buku-buku, laporan-laporan, arsip

literatur, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan obyek penelitian.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

### a. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer dengan cara wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya-jawab dengan informan yang tujuannya untuk mendapatkan informasi dan data-data yang diperlukan dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya pada kantor Pengadilan Negeri Boyolali.

Wawancara ini dilakukan dengan lisan atau percakapan langsung tanpa alat tulis atau dengan cara tertulis atau menggunakan alat atau instrumen pembantu. Secara tertulis menggunakan daftar pertanyaan berstruktur dengan daftar pertanyaan tentang permasalahan yang disiapkan oleh peneliti.

### b. Data Sekunder

Selain data primer, peneliti juga menggunakan data sekunder yang didapat melalui studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui jalan membaca, mempelajari, mengkaji, menelaah, membuat catatan yang diperlukan yang bersumber dari buku-buku ilmiah, literatur, arsip, dokumen, Peraturan Perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

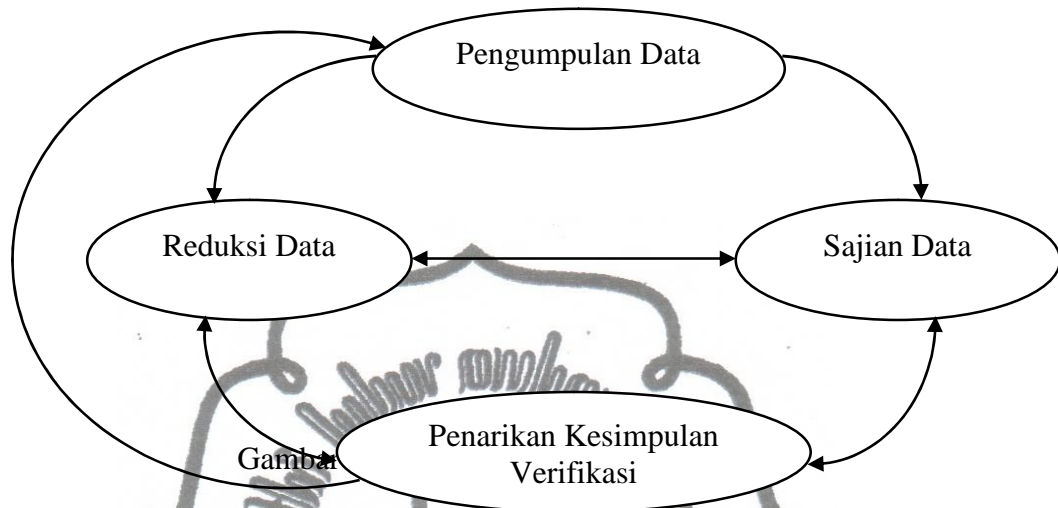
## 7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang diperlukan untuk menunjang penelitian ini, maka langkah berikutnya adalah menganalisis data. Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. (Lexy J Maleaong, 2002: 103). Sesuai dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu mengenai perpanjangan masa penahanan ditinjau dari segi hak Asasi Manusia di Pengadilan Negeri Boyolali memutus Perkara Nomor: 242/Pid.B/2007/PN.Bi dan Perkara Nomor: 1/PID.B/S/2010/PN.Bi, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif.

Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian data yang menghasilkan data deskriptif, apa yang dinyatakan responden secara tertulis / lisan dan juga perilaku yang sama dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Peneliti memperoleh data dari responden secara tertulis atau lisan, kemudian dikumpulkan

Pengertian model interaktif tersebut adalah bahwa data yang terkumpul akan dianalisis melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Selain itu dilakukan pula suatu proses antara tahap-tahap tersebut sehingga data yang terkumpul berhubungan satu sama lain secara sistematis (H.B.Sutopo, 2002: 94-96).

Digambarkan dalam bagan sebagai berikut :



Kegiatan komponen ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Reduksi Data

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian kepada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul pada catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus sampai sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun (H.B. Sutopo, 2002: 97). Dalam penelitian ini, guna mendapatkan data primer langkah yang dilakukan penulis adalah untuk mendapatkan informasi dan data-data yang diperlukan dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya pada kantor Pengadilan Negeri Boyolali.

Setelah data tersebut terkumpul, maka penulis memilih informan yang akan diwawancarai / dimintai data-datanya guna keperluan penelitian. Wawancara ini dilakukan dengan lisan atau percakapan langsung tanpa alat tulis atau dengan cara tertulis atau menggunakan alat atau instrumen pembantu. Secara tertulis menggunakan daftar pertanyaan berstruktur dengan

daftar pertanyaan tentang permasalahan yang disiapkan oleh peneliti. Dari proses tersebut, penulis memilih informan dari pihak Pengadilan Negeri Boyolali.

Pemilihan informan dilakukan berdasarkan peranan informan dalam pelaksanaan Perpanjangan Masa Penahanan Ditinjau dari Segi Hak Asasi Manusia di Pengadilan Negeri Boyolali memutus Perkara Nomor: 242/Pid.B/2007/PN.Bi dan Perkara Nomor: 1/PID.B/S/2010/PN.Bi. Selanjutnya oleh penulis melakukan wawancara, baik itu wawancara secara tertulis maupun secara lisan. Kemudian dari wawancara tersebut dihasilkan permulaan data yang belum disusun secara sistematis. Karena keterbatasan data primer dari informan, penulis juga mencari data sekunder melalui studi kepustakaan dengan membaca, mempelajari dan mengkaji dokumen-dokumen, arsip, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Perpanjangan Masa Penahanan Ditinjau dari Segi Hak Asasi Manusia di Pengadilan Negeri Boyolali memutus Perkara Nomor: 242/Pid.B/2007/PN.Bi dan Perkara Nomor: 1/PID.B/S/2010/PN.Bi.

## 2. Penyajian Data

Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (H.B.Sutopo, 2002: 97). Dalam penelitian ini, setelah semua data-data yang dibutuhkan penulis mengenai pelaksanaan Perpanjangan Masa Penahanan Ditinjau dari Segi Hak Asasi Manusia di Pengadilan Negeri Boyolali memutus Perkara Nomor: 242/Pid.B/2007/PN.Bi dan Perkara Nomor: 1/PID.B/S/2010/PN.Bi terkumpul, baik itu meliputi data primer dari hasil wawancara dan data sekunder dari studi kepustakaan, maka langkah selanjutnya penulis menyusun data-data tersebut

*commit to user*

secara sistematis, sehingga memberi kemungkinan untuk ditarik kesimpulan.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Dari permulaan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proporsi. Kesimpulan-kesimpulan akan ditangani dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan telah disediakan, mula-mula belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan pokok. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran penganalisis selama ia menulis, atau mungkin dengan seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali (H.B. Sutopo, 2002: 97). Pada tahap ini, setelah data tersusun secara sistematis, maka penulis menarik kesimpulan dari data-data mengenai pelaksanaan Perpanjangan Masa Penahanan Ditinjau dari Segi Hak Asasi Manusia di Pengadilan Negeri Boyolali memutus Perkara Nomor: 242/Pid.B/2007/PN.Bi dan Perkara Nomor: 1/PID.B/S/2010/PN.Bi yang didapatkan. Penarikan kesimpulan dilakukan melalui verifikasi dari data-data yang telah disusun secara sistematis dengan alur sebab akibat yang proporsional.

4. Model analisis ini merupakan proses siklus data interaktif. Penulis harus bergerak di antara empat bab sumbu kumparan itu selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak-balik di antara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan selama sisa waktu penelitiannya (H.B. Sutopo, 2002: 98).

## F. Sistematika Penulisan Hukum

*commit to user*



Dalam bagian ini, penulis mensistematiskan dalam bagian-bagian yang akan dibahas menjadi beberapa bab yang diusahakan dapat saling kait-mengait dan lebih tersistematis, terarah dan mudah dimengerti, sehingga saling mendukung dan menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh.

Adapun sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memberikan gambaran penulisan hukum mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian penulisan hukum.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis menguraikan Kerangka Teori dan Kerangka Pemikiran. Kerangka Teori terdiri dari beberapa tinjauan yang meliputi Tinjauan tentang Penahanan, dan Tinjauan tentang Hak Asasi Manusia.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini membahas mengenai hasil penjelasan dari penelitian, yaitu tentang analisis mengenai bagaimanakah implementasi Hak Asasi Manusia didalam kasus perpanjangan masa penahanan pada Perkara Nomor: 242/Pid.B/2007/PN.Bi dan Perkara Nomor: 1/PID.B/S/2010/PN.Bi? dan Apakah yang melatar belakangi hakim membutuhkan waktu dalam memutus Perkara Nomor: 242/Pid.B/2007/PN.Bi dan Perkara Nomor: 1/PID.B/S/2010/PN.Bi, sehingga memerlukan perpanjangan masa penahanan.

## **BAB IV : SIMPULAN DAN SARAN**

*commit to user*

Bab akhir ini mencakup tentang uraian kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran mengenai permasalahan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Tinjauan tentang Penahanan

###### a. Pengertian Penahanan

Definisi Penahanan sebagaimana ketentuan pasal 1 butir (21) KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur menurut Undang-undang ini. Pada prinsipnya penahanan adalah pembatasan kebebasan bergerak seseorang yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harusnya dihormati dan dilindungi oleh negara.

Penahanan yang dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa oleh pejabat yang berwenang dibatasi oleh hak-hak tersangka atau terdakwa dan peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan secara limitatif sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP.

Adapun pihak-pihak yang berwenang melakukan penahanan dalam berbagai tingkat pemeriksaan sebagaimana ketentuan pasal 20 KUHAP antara lain :

1. Untuk kepentingan penyidikan, yang berwenang melakukan penahanan adalah penyidik;

2. Untuk kepentingan penuntutan, yang berwenang adalah penuntut umum;
3. Untuk kepentingan pemeriksaan disidang Pengadilan, yang berwenang untuk menahan adalah Hakim.

Syarat-syarat untuk dapat dilakukan penahanan dibagi dalam 2 syarat, yaitu:

1. Syarat Subyektif.

Dinamakan syarat subyektif karena hanya tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan tadi, apakah syarat itu ada atau tidak. Syarat subyektif ini terdapat dalam Pasal 21 ayat (1), yaitu:

- a. Tersangka/terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana;
- b. Berdasarkan bukti yang cukup;
- c. Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa: Akan melarikan diri, Merusak atau menghilangkan barang bukti, Mengulangi tindak pidana.

Untuk itu diharuskan adanya bukti-bukti yang cukup, berupa Laporan Polisi ditambah dua alat bukti lainnya, seperti: Berita Acara Pemeriksaan Tersangka/Saksi, Berita Acara ditempat kejadian peristiwa, atau barang bukti yang ada.

2. Syarat Obyektif

Dinamakan syarat obyektif karena syarat tersebut dapat diuji ada atau tidak oleh orang lain. Syarat obyektif Ini diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP yaitu:

*commit to user*

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
- b. Tindak pidana yang ancaman hukumannya kurang dari lima tahun, tetapi ditentukan dalam:
  - 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1) , Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1). Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, Pasal 506;
  - 2) Pelanggaran terhadap Ordonantie Bea dan Cukai;
  - 3) Pasal 1, 2 dan 4 Undang-undang No. 8 Drt Tahun 1955 (Tindak Pidana Imigrasi) yaitu antara lain: tidak punya dokumen imigrasi yang sah, atau orang yang memberikan pemondokan atau bantuan kepada orang asing yang tidak mempunyai dokumen imigrasi yang sah;
  - 4) Tindak Pidana dalam Undang-undang No.9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

Dari uraian kedua syarat tersebut yang terpenting adalah syarat obyektif sebab penahanan hanya dapat dilakukan apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP itu dipenuhi. Sedangkan syarat yang terkandung dalam Pasal 21 ayat (1) biasanya dipergunakan untuk memperkuat syarat yang terkandung dalam Pasal 21 ayat (4) dan dalam hal-hal sebagai alasan mengapa tersangka dikenakan perpanjangan penahanan atau tetap ditahan sampai penahanan itu habis.

Dalam melaksanakan penahanan terhadap tersangka/terdakwa, maka pejabat yang berwenang menahan harus

*commit to user*

dilengkapi dengan Surat perintah penahanan dari Penyidik, Surat perintah penahanan dari Jaksa Penuntut Umum atau Surat penetapan dari Hakim yang memerintahkan penahanan itu.

Tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan Surat Perintah penahanan atau penahanan lanjutan yang berisikan Identitas Tersangka/Terdakwa, Alasan Penahanan, Uraian Singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan, dan Tempat dimana Tersangka/Terdakwa ditahan. Tembusan Surat Perintah Penahanan atau Penahanan Lanjutan atau Penetapan Hakim itu, harus diberikan kepada keluarga Tersangka/Terdakwa.

Jenis-jenis Penahanan yang diatur dalam pasal 22 ayat (1) KUHAP adalah Penahanan Rumah Tahanan Negara, Penahanan Rumah serta Penahanan Kota. Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Sedangkan Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diripada waktu yang ditentukan.

Penahanan yang dilakukan oleh pihak penyidik, penuntut umum maupun hakim memiliki batas waktu yaitu:

- 1) Penahanan oleh Polisi dan pejabat lain (Pasal 24 KUHP). Batas waktu penahanan paling lama 20 (dua puluh) hari. Bila masih diperlukan dengan seijin penuntut umu, waktu penahanan dapat diperpanjang paling lama 40 (empat puluh) hari. Jika sebelum 60 hari pemeriksaan telah selesai tahanan dapat dikeluarkan dan jika sampai 60 hari perkara belum juga



diputus maka demi hukum, penyidik (polisi) harus mengeluarkan Tersangka/Terdakwa dari tahanan.

2) Penahanan atas Perintah Penuntut Umum (Pasal 25 KUHP).

Batas waktunya paling lama 20 (dua) puluh hari. Dengan seijin Ketua Pengadilan Negeri, waktu dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga) puluh hari. Jika pemeriksaan telah selesai. Sebelum batas waktu 50 hari. Tersangka/Terdakwa dapat dikeluarkan. Lepas 50 hari, meskipun perkara belum diputus, tapi demi hukum penuntut umum harus mengeluarkan Tersangka/Terdakwa dari Tahanan.

3) Penahanan atas Surat Perintah Penahanan hakim Pengadilan Negeri (Pasal 26 KUHP). Batas waktu penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Bila belum selesai, penahanan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari dengan seijin Ketua Pengadilan Negeri. Jika pemeriksaan telah selsesai, sebelum batas waktu maksimal, Tersangka/Terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan, jika batas waktu maksimal (90) hari telah habis, meski perkara belum diputus, demi hukum tersangka/terdakwa harus dikeluarkan.

4) Penahanan atas Surat Perintah Penahanan hakim Pengadilan Tinggi (Pasal 27 KUHP). Batas waktu penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Bila belum selesai, penahanan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari dengan seijin Ketua Pengadilan Tinggi. Jika pemeriksaan telah selsesai, sebelum batas waktu maksimal, Tersangka atau Terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan, jika batas waktu maksimal (90) hari telah habis, meski perkara belum diputus, demi hukum tersangka/terdakwa harus dikeluarkan.

- 5) Penahanan atas perintah penahanan Mahkamah Agung (Pasal 28 KUHAP). Batas waktu penahanan paling lama 50 (lima puluh) hari, Jangka waktu penahanan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) untuk kepentingan pemeriksaan. Jika pemeriksaan telah selesai sebelum jangka waktu 110 hari, terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan. jika batas waktu maksimal 110 hari tersangka telah menjalani tahanan maka, demi hukum tersangka/terdakwa harus dikeluarkan.

#### **b. Perpanjangan Penahanan**

Beberapa jenis penahanan menurut Pasal 22 KUHAP, yaitu penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah, dan penahanan kota. Perlu diingat, tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim harus diberikan kepada keluarga tersangka. Masa penahanan:

1. Tingkat penyidik (polisi) berlangsung selama 20 hari dan jika diperlukan dapat diperpanjang selama 40 hari. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Setelah waktu 60 hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.
2. Tingkat penuntut umum berlangsung selama 20 hari dan jika diperlukan dapat diperpanjang selama 30 hari.
3. Tingkat Pengadilan Negeri berlangsung selama 30 hari dan jika diperlukan dapat diperpanjang selama 60 hari.

4. Tingkat Pengadilan tinggi berlangsung selama 30 hari dan jika diperlukan dapat diperpanjang selama 60 hari.
5. Tingkat Mahkamah Agung berlangsung selama 50 hari dan jika diperlukan dapat diperpanjang selama 60 hari.

Harus diketahui, bahwa pada tiap tingkat pemeriksaan tersebut tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhirnya waktu penahanan, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Mengenai hal ini perlu diperhatikan pula ketentuan Pasal 29 KUHAP. Perlu diingat:

1. Tersangka atau terdakwa dapat meminta penangguhan penahanan kepada penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat-syarat tertentu (Pasal 31 KUHAP).
2. Apabila hal-hal yang menjadi kewajiban penyidik tersebut tidak dilakukan atau dengan kata lain hak-hak tersangka yang dilanggar, maka tersangka dapat mengajukan praperadilan kepada Pengadilan Negeri.

**Tabel 1. Jangka Waktu Penahanan dan Penahanan Lanjutan**

Penahanan/Perpanjangan oleh		Waktu	Dasar Hukum
1.	Penyidik	20 Hari	Pasal 24 Ayat (1) KUHAP
	-Diperpanjang JPU	40 Hari	Pasal 24 Ayat (2) KUHAP
2.	Penuntut Umum	20 Hari	Pasal 25 Ayat (1) KUHAP
	-Diperpanjang Ketua PN	30 Hari	Pasal 25 Ayat (2) KUHAP
3.	Hakim Pengadilan Negeri	30 Hari	Pasal 26 Ayat (1) KUHAP
	-Diperpanjang Ketua PN	60 Hari	Pasal 26 Ayat (2) KUHAP
4.	Hakim Pengadilan Tinggi	30 Hari	Pasal 27 Ayat (1) KUHAP
	-Diperpanjang Ketua PT	60 Hari	Pasal 27 Ayat (2) KUHAP
5.	Hakim Mahkamah Agung	50 Hari	Pasal 28 Ayat (1) KUHAP
	-Diperpanjang Ketua MA	60 Hari	Pasal 28 Ayat (2) KUHAP
<b>Jumlah</b>		<b>400 Hari</b>	

(Sumber KUHAP Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.8 Tahun 1981)

Pengecualian dari jangka waktu penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 24, 25, 26, 27, 28 KUHAP, untuk kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang dengan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:

1. Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau
2. Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana 9 tahun atau lebih (Pasal 29 ayat (1) KUHAP).

**Tabel 2. Pengecualian Dalam Perpanjangan Penahanan**

	<b>Tingkat</b>	<b>Diberikan oleh</b>	<b>Lamanya</b>
1.	Penyidikan	Ketua PN	30 Hari
	-Perpanjangan	Ketua PN	30 Hari
2.	Penuntutan	Ketua PN	30 Hari
	-Perpanjangan	Ketua PN	30 Hari
3.	Pemeriksaan di PN	Ketua PT	30 Hari
	-Perpanjangan	Ketua PT	30 Hari
4.	Pemeriksaan Banding	Hakim MA	30 Hari
	-Perpanjangan	Hakim MA	30 Hari
5.	Pemeriksaan Kasasi	Ketua MA	30 Hari
	-Perpanjangan	Ketua MA	30 Hari
<b>Jumlah</b>		<b>300 Hari</b>	

(Sumber KUHAP Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.8 Tahun 1981)

## **2. Tinjauan tentang Hak Asasi Manusia**

### **a. Pengertian dan Definisi HAM**

HAM / Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak azasi manusia tanpa membedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.

Melanggar HAM seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hak asasi manusia memiliki wadah

organisasi yang mengurus permasalahan seputar hak asasi manusia yaitu Komnas HAM. Kasus pelanggaran ham di Indonesia memang masih banyak yang belum terselesaikan atau tuntas sehingga diharapkan perkembangan dunia ham di Indonesia dapat terwujud ke arah yang lebih baik. Salah satu tokoh ham di Indonesia adalah Munir yang tewas dibunuh di atas pesawat udara saat menuju Belanda dari Indonesia.

HAM Berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (*Declaration of Independence of USA*) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada Pasal 27 ayat 1, Pasal 28, Pasal 29 ayat 2, Pasal 30 ayat 1, dan Pasal 31 ayat 1.

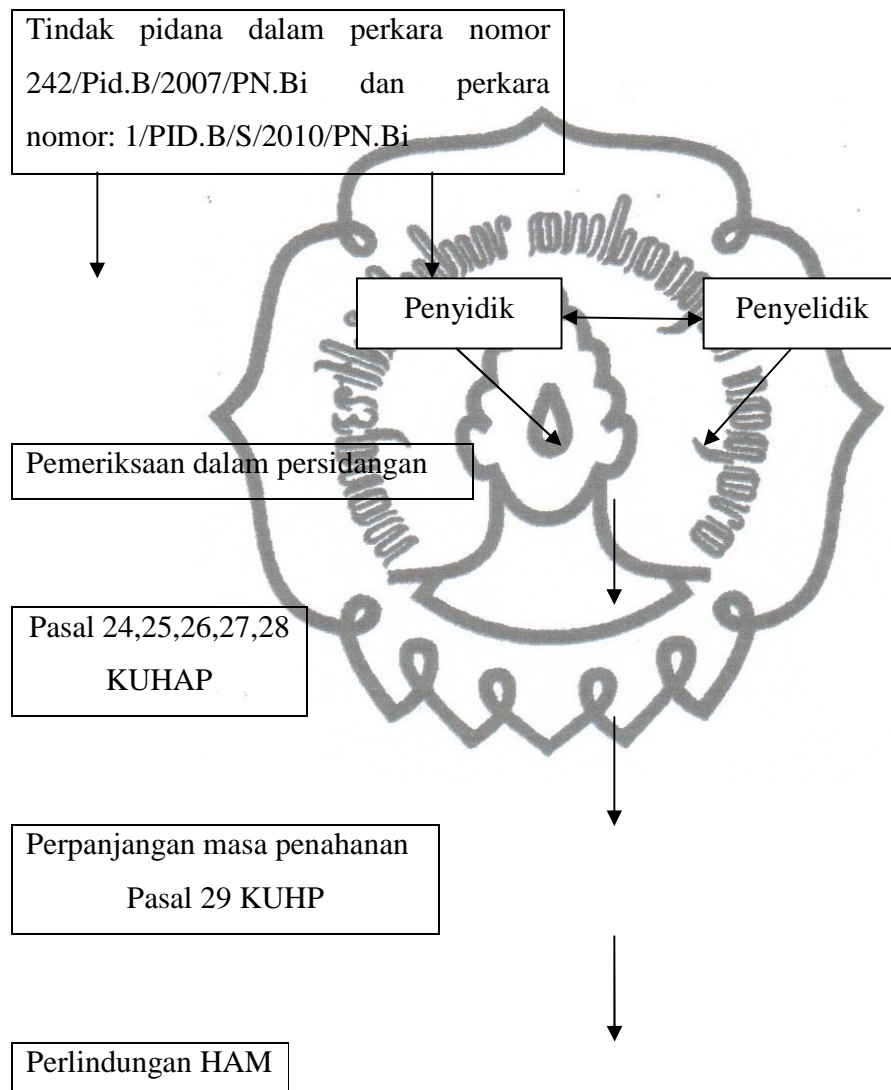
#### **b. Pembagian Bidang, Jenis dan Macam Hak Asasi Manusia Dunia**

1. Hak asasi pribadi / *Personal Right*:
  - a) Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pindah tempat.
  - b) Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat.
  - c) Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan.
  - d) Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing
2. Hak asasi politik / *Political Right*:
  - a) Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan.
  - b) Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan.
  - c) Hak membuat dan mendirikan parpol / partai politik dan organisasi politik lainnya.



- d) Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.
- 3. Hak azasi hukum / *Legal Equality Right*:
  - a) Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
  - b) Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / PNS
  - c) Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum
- 4. Hak azasi Ekonomi / *Property Rights*:
  - a) Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli
  - b) Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak
  - c) Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll
  - d) Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu
  - e) Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak
- 5. Hak Asasi Peradilan / *Procedural Rights*:
  - a) Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan
  - b) Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.
- 6. Hak asasi sosial budaya / *Social Culture Right*:
  - a) Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan
  - b) Hak mendapatkan pengajaran
  - c) Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.

## B. Kerangka Berpikir



**Keterangan:**

Bahwasannya pada tindak pidana dalam perkara nomor 242/Pid.B/2007/PN.Bi dan perkara nomor: 1/PID.B/S/2010/PN.Bi, yang mana untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 KUHAP berwenang melakukan penahanan guna kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan. Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pembenian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan *Staatsblad* Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambähan Lembaran Negara Nomor 3086).

Batasan waktu perintah penahan diberikan kepada Polisi dan pejabat lain (pasal 24 KUHAP), atas perintah Penuntut Umum (Pasal 25 KUHAP), atas surat perintah penahanan Hakim Pengadilan Negeri (Pasal 26 KUHAP), atas surat perintah penahan Hakim Pengadilan Tinggi (Pasal 27 KUHAP), dan atas perintah penahanan Mahkamah Agung (Pasal 28 KUHAP). Sedangkan Pengecualian perpanjangan (Pasal 29 KUHAP) mengenai ketentuan perpanjangan waktu penahanan (30 sampai 60 hari) berlaku bagi setiap Tahanan. Kecuali bila ada alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan, misalnya: karena Tersangka/Terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat (dengan surat keterangan dokter), atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih. Untuk kondisi-kondisi tersebut, setiap Tersangka/Terdakwa berhak mengajukan keberatan terhadap perpanjangan batas waktu penahanan ini melalui Ketua Pengadilan Tinggi (untuk tingkat penyidikan dan penuntutan). Sedang untuk tingkat Pengadilan Negeri dan pemeriksaan banding, pengajuan itu ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Implementasi Hak Asasi Manusia di dalam Kasus Perpanjangan Masa Penahanan Pada Perkara Nomor: 242/Pid.B/2007/PN.Bi dan Perkara Nomor: 1/PID.B/S/2010/PN.Bi**

Sebelum membahas mengenai implementasi Hak Asasi Manusia didalam kasus perpanjangan masa penahanan pada Perkara Nomor: 242/Pid.B/2007/PN.Bi dan Perkara Nomor: 1/PID.B/S/2010/PN.Bi, terlebih dahulu penulis akan memaparkan:

##### **1) Gambaran Umum Perkara Nomor: 242/Pid.B/2007/PN.Bi**

###### **a) Identitas Terdakwa:**

Nama lengkap	: SAHID bin MARDI
Tempat/Tanggal lahir	: Semarang
Umur/Tanggal lahir	: 24 tahun/03 Maret 1983
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa jlumpang RT.02/03, Kec. Bancak, Kab. Semarang

Agama : Islam

Pekerjaan : Sopir

Pendidikan Terakhir : SLTP

**b) Dalam perkara ini terdakwa telah menjalani beberapa perpanjangan masa penahanan seperti berikut:**

- 1) Penyidik sejak tanggal 30 September 2007 sampai dengan tanggal 19 oktober 2007.
- 2) Perpanjang penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2007.
- 3) Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2007 sampai dengan tanggal 17 Desember 2007.
- 4) Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2007 sampai dengan tanggal 3 januari 2008.
- 5) Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2008 sampai dengan tanggal 3 Maret 2008.

Pengadilan Negeri tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya yang antara lain;

- 1) Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
- 2) Telah melihat dan meneliti barang bukti dalam perkara terdakwa tersebut;



### c) Dakwaan Penuntut Umum

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2008 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut memutuskan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa SAHID bin MARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “dengan sengaja mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 78 ayat (7) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHID bin MARDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong selama terdakwa berada didalam tahanan dengan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3.1 1 (satu) unit KBM truk No. Pol. H 9672 DB; dirampas untuk Negara;
  - 3.2 kayu mahoni 1 (satu) batang dan kayu sono 8 (delapan) batang masing-masing dengan ukuran:  
  
1 (satu) batang kayu mahoni ukuran : 230 d 48 cm= 0,45 m<sup>3</sup>  
  
1 (satu) batang kayu sono ukuran : 170 d 57 cm= 0,47 m<sup>3</sup>

1 (satu) batang kayu sono ukuran : 240 d 54 cm= 0,59 m<sup>3</sup>

1 (satu) batang kayu sono ukuran : 230 d 54 cm= 0,57 m<sup>3</sup>

1 (satu) batang kayu sono ukuran : 240 d 50 cm= 0,51 m<sup>3</sup>

1 (satu) batang kayu sono ukuran : 230 d 50 cm= 0,98 m<sup>3</sup>

1 (satu) batang kayu sono ukuran : 260 d 35 cm= 0,27 m<sup>3</sup>

1 (satu) batang kayu sono ukuran : 120 d 35 cm= 0,27 m<sup>3</sup>

9 (Sembilan) batang = 3,93 m<sup>3</sup>

Dikembalikan kepada Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan  
Hutan Telawa, Juwangi, Boyolali.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mengakui atas perbuatannya, menyesali perbuatannya tersebut akhirnya mohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan;

#### d) Kasus Posisi

Penulis menyajikan kasus posisi yang dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SAHID bin MARDI, pada hari Sabtu tanggal 29 September 2007 sekitar jam 06.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September 2007, bertempat dialur/jalan hutan Negara petak 50 RPH Wuluhgedede, Desa Ngaren, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali; atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Boyolali, dengan sengaja

mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan, yakni dilakukan dengan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- a) Pada hari Jum'at tanggal 28 September 2007 sekitar jam 23.000 WIB ketika terdakwa berada di Jepara sedang mengemudikan truk warna merah No.Pol H 9672 DB bersama denga kernet yaitu saksi Mardiono bin Sugimin (disidangkan dalam berkas terpisah), terdakwa mendapat telepon dari Jumirin (melarikan diri belum tertangkap) untuk mengangkut kayu di dukuh Kaliwekas, desa Ngaren, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, dengan pesan agar terdakwa mengeluarkan kayu keluar dari Dukuh Kaliwekas, Desa Ngaren, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolai karena Jumirin melalui telepon mengatakan bahwa setelah keluar dari dukuh Kaliwekas, sudah ada orang suruhan Jumirin yang akan ikut bersama-sama dalam pengangkutan kayu, kemudian terdakwa bersedia walaupun belum ditentukan biaya ongkos angkut karena terdakwa sudah percaya dan mengerti sifat-sifat Jumirin apabila menyuruh tidak ingkar janji, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Mardiono bin Sugimin sebagai kernet untuk membantu menunjukkan jalan terdakwa menunjukkan kayu yang akan diangkut karena terdakwa belum mengetahui tempatnya dalam mengangkut kayu;
- b) Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 september 2007 sekira jam 04.30 WIB terdakwa dan saksi Mardiono bin Sugimin telah sampai di lokasi dukuh Kaliwekas, Desa Ngaren, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali kemudian ada warga kurang lebih 15 (lima belas) orang suruhan Jumirin menaikkan kayu rimba Mahoni dan Sono sebanyak 9 (Sembilan) batang kayu rimba Mahoni dan Sono

dengan kendaraan truk warna merah No.Pol H 9672 DB untuk diangkut keluar dari dukuh Kaliwekas, Desa Ngaren, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, dengan dibantu saksi Mardiono bin Sugimin sebagai kernet sekaligus sebagai penunjuk jalan;

c) Bahwa Kemudian didalam perjalanan pada hari Sabtu tanggal 29 September 2007 sekitar jam 06.30 WIB di alur jalan Hutan Negara Petak 50 RPH Wuluhgede tanah turut Desa Ngaren, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali terdakwa ditangkap Petugas Perhutani dan petugas berhasil menyita barang bukti berupa:

1 (satu) unit truk warna merah No.Pol H 9672 DB beserta 9 (Sembilan) batang kayu rimba mahoni dan sono, masing-masing dengan ukuran:

1 (satu) batang kayu mahoni ukuran : 230 d 48 cm= 0,45 m<sup>3</sup>

1 (satu) batang kayu sono ukuran : 170 d 57 cm= 0,47 m<sup>3</sup>

1 (satu) batang kayu sono ukuran : 240 d 54 cm= 0,59 m<sup>3</sup>

1 (satu) batang kayu sono ukuran : 230 d 54 cm= 0,57 m<sup>3</sup>

1 (satu) batang kayu sono ukuran : 240 d 50 cm= 0,51 m<sup>3</sup>

1 (satu) batang kayu sono ukuran : 230 d 50 cm= 0,98 m<sup>3</sup>

1 (satu) batang kayu sono ukuran : 260 d 35 cm= 0,27 m<sup>3</sup>

1 (satu) batang kayu sono ukuran : 120 d 35 cm= 0,27 m<sup>3</sup>

9 (Sembilan) batang = 3,93 m<sup>3</sup>

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (7)  
jo. Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

## 2) Gambaran Umum Perkara Nomor: 1/PID.B/S/2010/PN.Bi

### a) Identitas Terdakwa

Nama lengkap : SUTOYO bin JOYO PARMO

Tempat/Tanggal lahir : GROBOGAN

Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/12 Juni 1967

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Dk.Jetis, Desa Jetis, RT 04/02,

Kec. Karang Rayung,

Kab. Grobogan

Agama : Islam

Pekerjaan : Sopir

Pendidikan Terakhir : SD

**b) Dalam perkara ini terdakwa telah mmenjalani beberapa perpanjangan masa penahanan sebagai berikut:**

- 1) Penyidik, sejak tanggal 14 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 3 desember 2009;
- 2) Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2009 sampai dengan tanggal 23 Desember 2009;
- 3) Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2009 sampai dengan tanggal 10 Januari 2010;
- 4) Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan 2 Pebruari 2010;
- 5) Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 3 Pebruari 2010;

**c) Dakwaan Penuntut Umum**

Dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan Pengadila Negeri tersebut telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan. Telah mendengarkan tuntutan pidana dari jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaannya telah terbukti dan selanjutnya menuntut:

- 1) Menyatakan terdakwa Sutoyo bin Joyo parmo telah bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia



sebagaimana dimaksud Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan;

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) unit kendaraan truk No.Pol. K 1430 HF;
- b) 1 (satu) lembar STNK kendaraan truk No.Pol. K 1430 HF;

Dikembalikan kepada Rusmin:

- a) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Dina polri No.Pol.75015-XI;
- b) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Dinas Polri No.Pol.75015-XI;

Dikembalikan ke Polres Boyolali:

- 1 (satu) lembar SIM B I atas nama Sutoyo;

Dikembalikan ke terdakwa Sutoyo:

- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Suranto;

- 4) Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah pula mendengar pembelaan terdakwa yang diajukan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan penyesalan mengingat terdakwa mempunyai tanggungan keluarga keluarga, menyesali terjadinya kecelakaan tersebut dan sudah ada perdamaian dengan keluarga korban.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Boyolali berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. PDM-171/Boyol/Ep.1/12/2009 tanggal 23 Desember 2009.

**d) Kasus Posisi**

Penulis menyajikan kasus posisi yang dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Sutoyo bin joyo Parmo pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2009 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Nopember 2009 bertempat di jalan Klego Andong tepatnya di Dk. Sumber RT.15/03, Desa Ngegot, Kec. Klego, Kab. Boyolali atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri boyolali, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- 1) Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2009 sekitar jam 08.30 WIB mengemudikan truk No.Pol K 1430 HF tanpa muatan dengan tujuan mengambil pasir di daerah Klaten. Sesampainya di jalan Klego-Andong tepatnya di dukuh sumber RT.15/03 Desa Ngegot, Kec.Klego,Kab.Boyolali, terdakwa dalam mengemudikan truk tersebut yang berjalan dari arah Andong menuju ke Klrgo kurang berhati-hati sehingga tanpa sadar melaju

terlalu ke kanan melewati as jalan dan tiba-tiba dari arah berlawanan datang sepeda motor Dinas Polisi Suzuki No.Pol.75015-XI yang dikendarai oleh korban Suranto lalu secara spontan terdakwa berusaha membanting stir kekiri dan mengerem laju truk tetapi karena jarak yang sudah dekat maka truk menabrak bagian depan sepeda motor hingga ringsek sedangkan tru bagian samping kanan yaitu pintu dan pengaman bak truk penyok. Pengemudi sepeda motor yaitu korban Suranto terpengantol dan jatuh diaspal jalan sehingga meninggal dunia di tempat kejadian.

- 2) Berdasarkan *Visum et Reperum* Nomor 112ASY/XI/2009 tanggal 11 Nopember 2009 yang ditanda tangani oleh dr.Ony Handoko dokter pada Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik dasar Asy Syaifaiyyah yang menerangkan pada tubuh korban Suranto yaitu:
- Kepala terdapat luka terbuka panjang 25 cm dan lebar 5 cm isi kepala keluar;
  - Mulut keluar darah segar;
  - Lengan kanan tangan praktur atas bawah dan jari ke 4 tangan kanan hilang;
  - Terdapat jejas pada paha kanan;

Yang menyebabkan korban Suranto meninggal dunia;

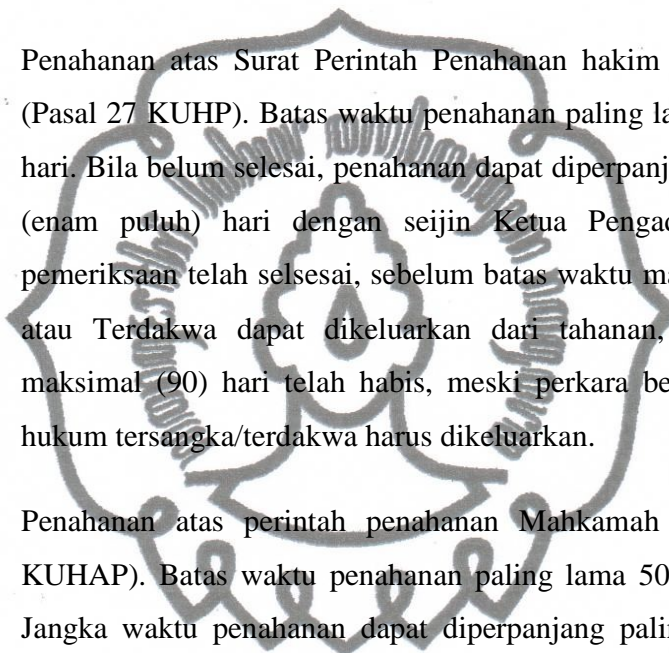
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**3) Pelaksanaan Perpanjangan Masa penahanan Pada Perkara Nomor: 242/Pid.B/2007/PN.Bi dan Perkara Nomor: 1/PID.B/S/2010/PN.Bi Sebagai perwujudan Implementasi Hak Asasi Manusia di Pengadilan Negeri Boyolali**

Pelaksanaan penahanan maupun perpanjangan masa penahanan di Pengadilan Negeri Boyolali dilakukan oleh pihak penyidik, penuntut umum maupun hakim dengan suatu penetapan dalam hal serta telah sesuai dengan tata cara yang diatur dalam pasal lain dalam KUHAP yang memiliki batas waktu yaitu:

- 1) Penahanan oleh Polisi dan pejabat lain (Pasal 24 KUHP). Batas waktu penahanan paling lama 20 (dua puluh) hari. Bila masih diperlukan dengan seijin penuntut umum, waktu penahanan dapat diperpanjang paling lama 40 (empat puluh) hari. Jika sebelum 60 hari pemeriksaan telah selesai tahanan dapat dikeluarkan dan jika sampai 60 hari perkara belum juga diputus maka demi hokum, penyidik (polisi) harus mengeluarkan Tersangka/Terdakwa dari tahanan.
- 2) Penahanan atas Perintah Penuntut Umum (Pasal 25 KUHP). Batas waktunya paling lama 20 (dua) puluh hari. Dengan seijin Ketua Pengadilan Negeri, waktu dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga) puluh hari. Jika pemeriksaan telah selesai. Sebelum batas waktu 50 hari. Tersangka/Terdakwa dapat dikeluarkan. Lepas 50 hari, meskipun perkara belum diputus, tapi demi hukum penuntut umum harus mengeluarkan Tersangka/Terdakwa dari Tahanan.
- 3) Penahanan atas Surat Perintah Penahanan hakim Pengadilan Negeri (Pasal 26 KUHP). Batas waktu penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Bila belum selesai, penahanan dapat diperpanjang paling lama 60

(enam puluh) hari dengan seizin Ketua Pengadilan Negeri. Jika pemeriksaan telah selsesai, sebelum batas waktu maksimal, Tersangka/Terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan, jika batas waktu maksimal (90) hari telah habis, meski perkara belum diputus, demi hukum tersangka/terdakwa harus dikeluarkan.

- 
- 4) Penahanan atas Surat Perintah Penahanan hakim Pengadilan Tinggi (Pasal 27 KUHP). Batas waktu penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Bila belum selesai, penahanan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari dengan seizin Ketua Pengadilan Tinggi. Jika pemeriksaan telah selsesai, sebelum batas waktu maksimal, Tersangka atau Terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan, jika batas waktu maksimal (90) hari telah habis, meski perkara belum diputus, demi hukum tersangka/terdakwa harus dikeluarkan.
  - 5) Penahanan atas perintah penahanan Mahkamah Agung (Pasal 28 KUHP). Batas waktu penahanan paling lama 50 (lima puluh) hari, Jangka waktu penahanan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) untuk kepentingan pemeriksaan. Jika pemeriksaan telah selesai sebelum jangka waktu 110 hari, terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan. jika batas waktu maksimal 110 hari tersangka telah menjalani tahanan maka, demi hukum tersangka/terdakwa harus dikeluarkan.

Prosedur Penahanan dan Perpanjangan Masa penahanan di Pengadilan Negeri Boyolali

1. Penahanan terhadap tersangka/ terdakwa dapat diperintahkan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau oleh Hakim berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

2. Dalam masalah penahanan, maka sisa masa penahanan yang menjadi tanggung jawab penyidik tidak boleh dipakai oleh Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan.
3. Perhitungan pengurangan masa tahanan dari pidana yang dijatuhkan harus dimulai dari sejak penangkapan/ penahanan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Pengadilan.
4. Untuk menghindari kesalahpahaman di pihak Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam menghitung kapan tersangka/ terdakwa harus dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan maka tenggang-tenggang waktu penahanan harus disebutkan dengan jelas dalam putusan.
5. Sejak perkara terdaftar di Register Pengadilan Negeri maka tanggung jawab atas perkara tersebut beralih pada Pengadilan Negeri, dan sisa masa penahanan Penuntut Umum tidak boleh diteruskan oleh Hakim.
6. Apabila tersangka tidak ditahan maka jika Hakim bermaksud menggunakan perintah penahanan harus dilakukan dalam sidang (Pasal 20 ayat (3) KUHAP).
7. Apabila tersangka atau terdakwa sakit dan perlu dirawat di rumah sakit, sedangkan ia dalam keadaan ditahan, maka penahanan tersebut dibantar selama dilaksanakan perawatan di rumah sakit.
8. Masa penahanan karena tersangka atau terdakwa diobservasi karena diduga menderita gangguan jiwa sejak tersangka atau terdakwa diobservasi ditangguhkan.
9. Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan perpanjangan penahanan yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Pasal 25 KUHAP tidak dibenarkan untuk sekaligus mengalihkan jenis penahanan.
10. Penangguhan penahanan dapat dikabulkan apabila memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 35, 36 PP No. 27 tahun 1983.



11. Yang dapat mengajukan permohonan penangguhan adalah tersangka/terdakwa (Pasal 31 ayat (1) KUHAP).
12. Besarnya uang jaminan ditentukan Hakim dengan memperhatikan berat ringannya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, kedudukan terdakwa/ penjamin dan kekayaan yang dimiliki olehnya.
13. Uang jaminan tersebut harus diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Uang jaminan yang diminta Penuntut Umum ataupun Pengadilan Tinggi tetap harus diserahkan dan disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri (Pasal 35 PP No. 27 tahun 1983).
14. Apabila terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, maka uang jaminan tersebut berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan menjadi milik negara, dan disetor ke kas negara.
15. Dalam hal terdakwa melarikan diri, maka penjamin wajib membayar uang jaminan yang telah ditetapkan dalam perjanjian, apabila penjamin tidak membayar, maka melalui penetapan Pengadilan dilakukan penyitaan terhadap barang-barang milik penjamin menurut hukum acara perdata dan kemudian barang tersebut dilelang dan hasil lelang disetor ke kas negara.
16. Apabila terdakwa melarikan diri, maka penjamin tidak dapat diajukan sebagai terdakwa ke pengadilan dan mengenai persyaratan untuk diterima sebagai penjamin orang tersebut harus memiliki kecakapan untuk bertindak cukup mampu dan bertempat tinggal di Indonesia.
17. Pasal 21 ayat (4) KUHAP mengatur tentang tindak pidana yang terdakwa dapat ditahan. Dalam hal ketentuan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP terpenuhi, Hakim dalam amar putusannya berbunyi memerintahkan agar terdakwa ditahan, putusan untuk itu harus disesuaikan dengan rumusan Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHAP, yaitu memerintahkan agar terdakwa ditahan.

18. Untuk menghindari keterlambatan dikeluarkannya penetapan perpanjangan penahanan (Pasal 29 KUHAP) oleh Ketua Pengadilan Tinggi, maka Ketua Pengadilan Negeri harus menyampaikan surat permohonan perpanjangan penahanan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum masa penahanan berakhir.
19. Dalam hal terdakwa atau Penuntut Umum mengajukan banding, maka kewenangan penahanan beralih ke Pengadilan Tinggi sejak pernyataan banding tersebut.
20. Permohonan banding harus segera dilaporkan dengan sarana komunikasi tercepat pada hari itu juga kepada Pengadilan Tinggi.
21. Apabila Ketua/ Hakim Pengadilan Tinggi akan melakukan penahanan, maka penetapan penahanan harus segera dikeluarkan.
22. Pada azasnya selama tersangka atau terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan segenapnya dari hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim (Pasal 22 ayat (4) KUHAP), akan tetapi apabila ada hal-hal yang khusus, Hakim dapat menjatuhkan putusan tanpa memotong tahanan (Pasal 33 ayat (1) KUHP).
23. Yang berwenang mengeluarkan tersangka/ terdakwa demi hukum dari tahanan adalah pejabat ditempat mana tersangka/ terdakwa ditahan.

Status Tahanan:

1. Tanggung jawab yuridis penahanan untuk pemeriksaan acara biasa berada pada pengadilan sejak perkara tersebut di limpahkan sedangkan untuk acara pemeriksaan acara singkat sejak saat penyidikan perkara tersebut.
2. Sejak putusan berkekuatan hukum tetap status terdakwa beralih menjadi narapidana.

3. Terhadap putusan bebas atau putusan lepas dari tuntutan hukum dimana Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
4. Apabila masa penahanan telah sama dengan pidana penjara yang diputuskan oleh Pengadilan maka terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
5. Apabila lamanya terdakwa ditahan telah sesuai dengan pidana penjara yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Surat perintah tersebut tembusannya dikirim ke Mahkamah Agung dan Jaksa kalau perkaranya kasasi.
6. Apabila dalam tingkat banding, maka lamanya penahanan telah sama dengan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan dari tahanan atas izin Ketua Pengadilan Tinggi.
7. Paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum masa penahanan berakhir Pengadilan Negeri wajib menanyakan tentang status penahanan terdakwa kepada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

Penahanan tersebut dilakukan bilamana memang sangat diperlukan bagi kepentingan penegakan hukum, segala tindakan penahanan dilakukan oleh pejabat yang berwenang melakukan penahanan serta harus sesuai dengan KUHAP, hal ini untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam pelaksanaan penahanan yang nantinya dapat menyebabkan akibat hukum yang fatal bagi pejabat yang melakukan penahanan.

Pihak terdakwa dalam hal ini dapat diwakili oleh pihak keluarga maupun kuasa hukumnya dapat mengajukan keberatan atas penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa dengan tata cara sebagai berikut:

- a) Tersangka, keluarga, atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan atas penahanan atau atas jenis penahanan yang dikenakan kepada tersangka kepada penyidik yg melakukan penahanan itu (Pasal 123 ayat 1).
- b) Apabila dalam waktu 3 (tiga) permintaan tersebut belum dikabulkan oleh penyidik, tersangka, keluarga atau Penasehat Hukum dapat mengajukan hal itu kepada atasan penyidik (Pasal 123 ayat 3).
- c) Penyidik atau atasan penyidik sebagaimana dalam ayat tersebut dapat mengabulkan permintaan dengan atau tanpa syarat (Pasal 123 ayat 5).

Pada Pengadilan Negeri Boyolali demi untuk menjaga dan agar tidak merugikan kepentingan terdakwa dikarenakan adanya penahanan yang kemungkinan dapat dilangsungkan dalam waktu yang cukup lama maka terdakwa dapat memohon penahanannya untuk ditangguhkan. Mengenai penangguhan penahanan tersebut diatur dalam Pasal 31 KUHAP, dimana penangguhan tersebut dapat dikabulkan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing dengan menetapkan ada atau tidaknya jaminan uang atau orang berdasarkan syarat-syarat tertentu apabila syarat tersebut dilanggar maka penangguhan tersebut dapat dicabut kembali dan terdakwa tersebut dapat kembali ditahan.

**B. Hal yang melatar belakangi hakim membutuhkan waktu dalam memutus perkara Nomor: 242/Pid.B/2007/PN.Bi dan perkara Nomor: 1/PID.B/S/2010/PN.Bi, sehingga memerlukan perpanjangan masa penahanan**

Hal yang melatarbelakangi hakim terlambat di dalam memutus perkara Nomor:242/Pid.B/2007/PN.Bi dan perkara Nomor:1/PID.B/S/2010/PN.Bi, sehingga memerlukan perpanjangan masa penahanan adalah sebagai berikut:

Menurut pendapat Bapak Yusuf Pranowo, S.H, selaku salah satu hakim di Pengadilan Negeri Boyolali yang juga sebagai salah satu hakim anggota yang menangani perkara Nomor:242/Pid.B/2007/PN.Bi dan perkara Nomor:1/PID.B/S/2010/PN.Bi, berdasarkan pada wawancara tanggal 15 Oktober 2010 hal yang melatar belakangi hakim membutuhkan waktu di dalam memutus perkara Nomor: 242/Pid.B/2007/PN.Bi dan perkara Nomor:1/PID.B/S/2010/PN.Bi, adalah dikarenakan memang ada beberapa kepentingan pemeriksaan yang memang masih belum terpenuhi sehingga masih dianggap perlu untuk dilakukan penahanan terhadap terdakwa/tersangka antara lain ditemukannya beberapa bukti yang masih perlu diselidiki kembali kebenarannya, keterangan saksi-saksi yang berbelit-belit dan terkadang kesaksiannya tidak konsekwen dalam menjawab pertanyaan baik dalam proses penyidikan maupun pemeriksaan dimuka persidangan sehingga menghambat proses pemeriksaan perkara. Selain itu perpanjangan masa penahanan tersebut dilakukan guna kepentingan penuntutan jaksa penuntut umum (JPU).

Permohonan tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Boyolali tetapi perpanjangan ini tidak boleh lebih dari 60 hari. Selesai atau tidak selesai pemeriksaan kasus ini, tidak ada jalan lain untuk

memperpanjang penahanan lagi, dan terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan “demi hukum” apabila batas maksimum waktu penahanan tersebut telah berakhir.





## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut :

1. Perwujudan Pelaksanaan Perpanjangan Masa penahanan di Pengadilan Negeri Boyolali telah sesuai dengan penetapan dalam hal serta dengan tata cara yang diatur dalam KUHP, tetapi jika mengacu pada Perkara Nomor: 242/Pid.B/2007/PN.Bi dan Perkara Nomor: 1/PID.B/S/2010/PN.Bi dirasa tidak tepat.
2. Hal yang melatar belakangi hakim membutuhkan waktu di dalam memutus perkara Nomor: 242/Pid.B/2007/PN.Bi dan perkara Nomor: 1/PID.B/S/2010/PN.Bi, sehingga memerlukan perpanjangan masa penahanan adalah dikarenakan memang ada beberapa kepentingan pemeriksaan yang memang masih belum terpenuhi sehingga masih dianggap perlu untuk dilakukan penahanan terhadap bagi terdakwa antara lain adanya beberapa bukti yang masih perlu diselidiki kembali kebenarannya serta keterangan saksi-saksi yang berbelit-belit yang terkadang kesaksiannya tidak konsekuen dalam menjawab pertanyaan baik dalam proses penyidikan maupun pemeriksaan dimuka pengadilan sehingga menghambat proses pemeriksaan perkara. Selain itu perpanjangan masa penahanan tersebut dilakukan guna kepentingan penuntutan jaksa penuntut umum (JPU).

*commit to user*

## B. Saran-Saran

1. Hendaknya suatu penahanan dilakukan bilamana memang sangat diperlukan bagi kepentingan penegakan hukum.
2. Perlu ada pengaturan yang lebih terperinci dan tidak multi tafsir terhadap ketentuan KUHAP yang berkaitan dengan syarat-syarat melakukan penahanan.

